

# SINTESIS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PENGUSAHA KECIL DAN KOPERASI

Oleh: Willem Dagi, SP, MM  
(Alumni MMA-IPB, Angkatan Eksetkutif 3)



## I. Permasalahan Kesenjangan Sosial dan Ekonomi

Sasaran pembangunan "adil dan makmur" yang tertuang dalam sila kelima, memberikan indikasi bahwa ada 2 pokok utama yang perlu diperhatikan dalam seluruh agenda dinamika pembangunan ekonomi Indonesia sebagai berikut:

- a. Keadilan sosial berarti seluruh aktifitas ekonomi melibatkan seluruh tingkatan masyarakat tanpa melihat latar belakangnya selama pihak-pihak tersebut dalam status rakyat Indonesia. Hal ini berarti bahwa aktifitas pembangunan ekonomi harus memberikan peluang ikut berpartisipasi bagi seluruh rakyat dan lembaga pelaku ekonomi yaitu pemerintah (BUMN/BUMD), swasta (pengusaha kecil dan besar), dan koperasi.
- b. Seluruh aktifitas pembangunan ekonomi Indonesia harus memberikan kemakmuran secara adil, artinya seluruh rakyat mendapatkan akses yang sama untuk mendapatkan kemakmuran dari aktifitas ekonomi makro dan mikro Indonesia.

Kedua pokok pikiran tersebut yang seharusnya digunakan dalam berbagai perumusan kebijakan pengembangan pengusaha kecil dan koperasi, baik sebagai ketentuan normatif maupun ketentuan pelaksanaan. Prinsip "keadilan dan kemakmuran" tersebut dijadikan sebagai acuan utama, sebab data yang diungkapkan Sanim (1997a) memperlihatkan bahwa hampir semua negara maju membuat struktur ekonominya yang melibatkan pengusaha kecil dan besar secara seimbang, bahkan pemerintah

rakyat lainnya; sebaliknya "beban ekonomi" semakin tinggi ditanggung rakyat akibat kemiskinannya sebab dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka meningkat juga harga-harga kebutuhan dasar manusia (sandang dan pangan) dimana rakyat miskin semakin sulit mendapatkan untuk pemenuhan hidupnya.

Jika kondisi tersebut memasukkan variabel "krisis ekonomi" yang diakibatkan oleh kesalahan menentukan arah kebijakan ekonomi, maka kedua variabel yang ditanggung rakyat semakin berubah

**Dapat disimpulkan bahwa kemiskinan struktural akan semakin meningkat dan semakin sulit ditanggulangi jika kebijakan ekonomi tidak memberikan akses ekonomi yang adil terhadap rakyat kecil. Untuk pengusaha kecil akan semakin sulit berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi jika tidak diberikan akses pasar yang seimbang dengan para pelaku ekonomi lainnya terutama swasta besar dan BUMN**

yaitu variabel "manfaat" akan semakin kecil sedangkan variabel "beban ekonomi" akan semakin besar. Padahal rakyat kecil bukanlah penentu kebijakan, tetapi mereka yang menanggung cukup besar akibat dari kesalahan tersebut. Secara teoritis hal ini disebut sebagai biaya sosial (*social costs*) akibat dari kesalahan arah kebijakan tersebut.

negara-negara maju tersebut memperlihatkan keberpihakan yang tinggi terhadap pengusaha kecil.

Saat ini, apalagi bila ditambah dengan krisis ekonomi, maka terlihat kesulitan ekonomi yang ditanggung rakyat Indonesia akibat tidak seimbangnya variabel "manfaat" dan "beban ekonomi" yang ditanggung rakyat Indonesia. Rakyat miskin semakin menghadapi kemiskinan strukturalnya akibat tidak mendapatkan "manfaat" yang seimbang dengan sebagian kelompok

Dapat disimpulkan bahwa kemiskinan struktural akan semakin meningkat dan semakin sulit ditanggulangi jika kebijakan ekonomi tidak memberikan akses ekonomi yang adil terhadap rakyat kecil. Untuk pengusaha kecil akan semakin sulit berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi jika tidak diberikan akses pasar yang seimbang dengan para pelaku ekonomi lainnya terutama swasta besar dan BUMN. Biaya sosial akan dapat diperkecil jika dilakukan reformasi ekonomi

melalui konsistensi implementasi kebijakan ekonomi serta membuat kebijakan ekonomi yang langsung membuka peluang usaha yang seimbang antara seluruh lapisan masyarakat.

Program-program pengembangan dan pembinaan pengusaha kecil selama ini belum banyak memberikan manfaat pertumbuhan dan pemerataan "manfaat" ekonomi yang didapatkannya. Hal ini diakibatkan karena faktor kualitas produk, manajemen bisnis, dan akses pasar yang tidak seimbang dengan pelaku bisnis lainnya. Sebagai contoh kasus petani cabai di Brebes (Kompas, 30 dan 31 Agustus 1996), ketika produksi melimpah mereka sulit mencari akses pasar terhadap komoditi yang dihasilkannya, sebaliknya dengan produksi meningkat tersebut maka harga komoditi menurun.

Kondisi harga tersebut diatas memperlihatkan bahwa harga komoditi usaha kecil (terutama disektor pertanian) bersifar lokal padahal seharusnya nasional. Jika jumlah seluruh hasil produksi cabai petani Brebes tersebut dikonversi kedalam skala nasional maka jumlah produksinya (ditiambah dengan Lampung) tetap sangat kecil dalam skala nasional, sehingga seharusnya harga mereka tetap kompetitif dan seimbang dengan masukan (input) produksinya seperti pupuk dan obat-obatan.

Jika arah kebijakan pembangunan ekonomi dilihat dengan perspektif bisnis skala nasional (*Indonesian incorporated*) maka kelebihan produksi (*over supply*) disuatu tempat tidak dapat diperhitungkan dengan kebijakan harga setempat melainkan nasional

Pandangan dari kasus Brebes tersebut memperlihatkan bahwa apapun yang dilakukan dalam program pengembangan dan pembinaan pengusaha kecil, harus dilihat dalam pandangan nasional. Kenyataan yang

terlihat program pembinaan sangat besar porsinya dibandingkan dengan program pengembangan. Program pengembangan belum banyak melakukan usaha-usaha membuka akses pasar dan kestabilan harga komoditi yang dihasilkan oleh pengusaha kecil.

Sebaliknya, dengan adanya program pembinaan maka kemampuan pengusaha kecil semakin meningkat sehingga jumlah produksi meningkat, tetapi dengan keterbatasan jumlah produksi yang diserap oleh pasar maka pengusaha kecil selalu mengalami kelebihan persediaan (*over stock*) akibatnya beban biaya produksi semakin sulit tertanggulangi. Sehingga, walaupun program pengembangan dan

**Konglomerasi yang kuat dan memberikan pengaruh peningkatan ekonomi negara adalah konglomerasi yang strukturnya terbentuk dari sejumlah pengusaha kecil yang potensial. Untuk itu, konglomerat harus ikut bertanggung-jawab bagi pemberdayaan (empowerment) pengusaha kecil dalam hal akses informasi dan manajemen bisnis modern**

pembinaan pengusaha kecil semakin banyak instansi yang "berminat" tetapi ternyata belum memberikan solusi tepat terhadap pengentasan kemiskinan dan membuka lapangan kerja.

## II. Sintesa Relevansi Transformasi Ekonomi

a. Melihat kenyataan operatif pengembangan dan pembinaan usaha kecil serta potensi kemiskinan struktural akibat praktek kebijakan ekonomi yang tidak seimbang memberikan variabel "manfaat" serta variabel "beban ekonomi" tersebut, maka sudah selayaknya dibutuhkan transformasi struktur ekonomi yang memberikan "manfaat" dan "beban ekonomi" yang seimbang

antara setiap golongan masyarakat.

b. **Konglomerasi perusahaan-perusahaan besar Indonesia seharusnya melibatkan pengusaha kecil.** Walaupun ada tantangan bahwa sulitnya melibatkan pengusaha kecil secara professional karena kurangnya kemampuan pengusaha kecil untuk melaksanakan manajemen bisnis modern, tetapi bila konglomerat menyadari kenyataan bahwa tidak ada satupun kekuatan ekonomi suatu perusahaan besar dapat bertahan jika tanpa adanya keterlibatan usaha kecil sehingga itu selayaknya kondisi ini dipertimbangkan.

c. Semakin besar suatu perusahaan maka beban ekonominya juga akan semakin besar, dengan melibatkan pengusaha kecil maka beban ekonomi akan menyebar merata sebaliknya pengusaha kecil mendapatkan "manfaat" ekonomi dari produk-produk yang dibuatnya berintegrasi dengan proses produksi pengusaha besar.

d. Perrow (1992) mengatakan bahwa konglomerasi yang kuat dan memberikan pengaruh peningkatan ekonomi negara adalah konglomerasi yang strukturnya terbentuk dari sejumlah pengusaha kecil yang potensial. Untuk itu, konglomerat harus ikut bertanggung-jawab bagi pemberdayaan (empowerment) pengusaha kecil dalam hal akses informasi dan manajemen bisnis modern yang terdiri dari : manajemen kualitas, manajemen operasi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, dan manajemen organisasi. Sebaliknya pengusaha kecil juga harus ikut bertanggung jawab terhadap pengembangan dirinya

sendiri secara professional. Menyangkut **tentang** pengusaha kecil, **Perrow** mengatakan bahwa pengusaha kecil harus mampu mengernbangkan jaringan kerja (network) **dengan** pengusaha besar (konglomerat).

- e. Dibutuhkan **perumusan** kebijakan pemerintah yang terpadu antara setiap instansi yang terkait, sebab kenyataan bahwa masalah pengusaha kecil tidak hanya terdiri dari suatu masalah saja tetapi sangat rumit (kompleks) sehingga membutuhkan kerkaitan berbagai instansi yang langsung terlibat memberikan jalan keluar secara **operatif** terhadap permasalahan usaha kecil. Kenyataannya, masalah "ego sektoral" dan perbedaan persepsi antara instansi terkait masih nyata tedadi dilapangan sehingga pengusaha kecil masih sulit dicarikan jalan keluarnya yang langsung berdaya-guna.

Untuk mengatasi berbagai masalah kemiskinan serta pembinaan dan pengembangan pengusaha kecil, maka usaha-usaha yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. **Pertama-tama** harus dimulai dari mendorong keberpihakan pengusaha besar kepada pengusaha kecil secara nyata yang disertai dengan peraturan yang **jelas**. Misalnya bagi konglomerat yang terbukti dapat melibatkan pengusaha kecil dalam struktur konglomerasinya, maka perusahaan konglomerat tersebut akan semakin mendapatkan akses informasi untuk pengembangan usahanya lebih lanjut. Tetapi yang terbukti tidak dapat menyusun struktur konglomerasinya dari pengusaha kecil, maka peluang usahanya tidak akan diberikan lagi. Dasar peraturan tersebut didasari oleh UUD 1945 bahwa setiap warga

negara Indonesia harus memperhatikan hak orang **banyak**.

- b. **Pemberdayaan** (*empowerment*) dibutuhkan agar **partisipasi** masyarakat semakin meningkat untuk **ikut** menentukan **perilaku** sistem kekuasaan (Sanim, 1997b). Pemberdayaan tidak dapat **terlaksana** dengan efektif jika akses inormasi tidak berlangsung dengan efektif (Minzberg, 1979; 1993). Mengacu pada pendapat kedua pakar tersebut, maka usaha pemberdayaan **harus** diimbangi dengan akses informasi yang seimbang antara pengusaha kecil dan pengusaha besar. **Selama** ini, pengusaha kecil mendapatkan

hidupnya. Perbaikan lingkungan **hidup sekitarnya** meliputi politik dan **pemerintahan**, bidang ekonomi dan kepemilikan **sumber** daya **alam**, serta bidang sosial, kebudayaan dan kelembagaan. Berarti **solusi** pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara holistik, multiaspek, multidimensi dan komprehensif (Sanim, 1997b).

Menyangkut butir (a), (b) dan (c) tersebut diatas, berarti dibutuhkan **reformasi** sosial ekonomi yang dilakukan oleh **seluruh** instansi terkait, swasta, maupun pribadi yang **merasa** bertanggung jawab dengan kehidupan masyarakat **dan** negara **secara** ke **seluruhan**. Prakteknya, **selama** ini keberpihakan tersebut

hanya terlihat dilingkup perkotaan itupun dalam skala sangat sempit sekali artinya hanya jika terjadi masalah misalnya SEMBAKO saat ini, tetapi ketika terjadi kelaparan di Irian Jaya hanya sebagian kecil yang memperhatikannya dan sebagian besar lainnya sangat sibuk dengan valuta asing dan simpanan di bank yang dilikuidasi. Padahal seharusnya orang kota menyadari bahwa **mereka** dapat **hidup** karena adanya masukan (*supply*) produksi dari masyarakat pedesaan.

- d. Menyangkut butir (c) tersebut diatas, maka kunci utama pembangunan sosial ekonomi yaitu kebijakan pemerintah yang bersifat **operatif** Kebijakan yang bersifat **operatif** berarti **kebijakan** tersebut proaktif terhadap aktifitas ekonomi yang memberikan akses ekonomi yang tinggi kepada masyarakat.
- e. Kebijakan **operatif** (butir e) tersebut, berarti **peran** pemerintah harus menjalankan fungsi "public services" yang melakukan kegiatan **informatif** terhadap rakyatnya. Untuk itu, dibutuhkan keterbukaan politik

**Upaya pemerataan dan kesempatan kerja bukanlah satu-satunya solusi, tetapi dibutuhkan usaha-usaha memutus struktur rantai kemiskinan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memperbaiki lingkungan hidup masyarakat miskin itu sendiri sehingga mereka dapat melakukan perbaikan taraf hidupnya**

akses informasi yang tidak seimbang dengan pengusaha besar dalam mencari peluang **bisnis** dalam rangka mencari jalan keluar terhadap perbaikan status hidup pengusaha kecil tersebut.

- c. **Masalah** kemiskinan hanya dapat diatasi jika masyarakat miskin mendapatkan sarana pendidikan dan perbaikan taraf hidupnya. Upaya pemerataan dan kesempatan kerja **bukanlah** satu-satunya solusi, tetapi dibutuhkan usaha-usaha memutus struktur rantai kemiskinan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memperbaiki lingkungan hidup masyarakat **miskin** itu sendiri sehingga mereka dapat melakukan perbaikan taraf

yang membantu perubahan sosial-ekonomi terutama pengentasan kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. (*Mungkin hal ini yang dimaksudkan reformasi politik dan ekonomi oleh kalangan pakar saat ini ?*).

### III. Kemajuan Ekonomi Terhadap Gerakan Kewirausahaan

Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan ekonomi Indonesia dicapai melalui kontribusi masyarakat kecil sebagai tenaga kerja atau yang menyediakan sumberdaya lainnya seperti tanah miliknya dan peluang yang bisa didapatkannya melalui tanah miliknya tersebut.

Tidak dapat dipungkiri juga bahwa pengusaha kecil sangat adaptif dan fleksibel dalam menghadapi situasi krisis ekonomi. Berarti negara mendapatkan kontribusi ekonomi dari pengusaha kecil ketika situasi krisis terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa pengusaha kecil sangat berpotensi jika dikembangkan untuk mendukung ketangguhan ekonomi. Tidak ada satupun negara maju yang memiliki ketangguhan ekonomi tanpa adanya kontribusi pengusaha kecil, sebab pengusaha kecil berpotensi menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta menyerap sebagian beban ekonomi (resiko ekonomi) yang ditanggung perusahaan besar. Perusahaan besar dapat menyebarkan sebagian beban biaya produksi kepada pengusaha kecil, tetapi pengusaha kecil mendapatkan peluang pasar terhadap produk-produknya yang dibeli oleh pengusaha besar.

Kedua kenyataan tersebut harus disikapi sebagai adanya potensi ekonomi yang besar dari kontribusi para pengusaha kecil. Prinsip ekuitas (*equity*) dalam kebijakan pembangunan sosial-ekonomi dengan memperhatikan harmonisasi jaringan kerja antara pengusaha kecil dan

pengusaha besar menengah akan memperkuat ketangguhan ekonomi Indonesia. Pengusaha kecil dapat menyerap biaya tenaga kerja dan biaya produksi, sedangkan hasil produksinya dikonsumsi oleh perusahaan besar yang diolah kembali menjadi suatu produk bernilai tambah untuk pasar global.

Pola kerjasama tersebut akan saling memperkuat struktur masyarakat. Masukan kontribusi dari masyarakat pengusaha kecil akan memperkuat struktur ekonomi masyarakat lapisan atas. Sebaliknya, jika pengusaha kecil semakin berkembang maka akan terjadi pergeseran struktur masyarakat dari lapisan bawah bergerak menjadi struktur masyarakat lapisan

**Pengusaha kecil sangat berpotensi jika dikembangkan untuk mendukung ketangguhan ekonomi. Tidak ada satupun negara maju yang memiliki ketangguhan ekonomi tanpa adanya kontribusi pengusaha kecil, sebab pengusaha kecil berpotensi menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta menyerap sebagian beban ekonomi (resiko ekonomi) yang ditanggung perusahaan besar**

menengah, akibatnya struktur masyarakat lapisan menengah akan semakin kuat.

Jika masyarakat lapisan menengah semakin kuat dan tangguh maka potensi produktif untuk meningkatkan skala ekonomi nasional. Jika skala ekonomi nasional meningkat, berarti berbagai peluang dapat dicapai yaitu tingkat pendidikan dan pendapatan akan meningkat yang akan memperkuat kemampuan masyarakat untuk mengembangkan teknologi, sehingga memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat banyak dan meningkatkan devisa negara sebagai jaminan bagi kestabilan ekonomi Indonesia.

Persoalan yang masih menjadi agenda ekonomi kita yaitu kemampuan alih teknologi dan menerapkan manajemen bisnis modern dari pengusaha kecil masih sangat lemah. Untuk itu, program pengembangan dan pembinaan pengusaha kecil harus dilakukan secara holistik (Sanim, 1997b).

### IV. Kewirausahaan dengan Daya Saing Nasional dalam Perdagangan Global

Keberhasilan pengembangan pengusaha kecil akan dapat membantu kemandirian dan daya saing nasional. Sebab jika pengusaha kecil berhasil dikembangkan berorientasi ekspor maka Indonesia akan memiliki pertambahan cadangan devisa sehingga akan memperkuat struktur ekonomi yang merupakan jaminan kestabilan kekuatan mata uang rupiah terhadap mata uang asing. Akibatnya akan mendorong stabilisasi aktifitas ekonomi yaitu impor dan ekspor, dimana hal ini akan mendorong produktifitas industri Indonesia.

Indonesia akan dapat bersaing ditingkat perdagangan global jika ekonomi domestiknya kuat, sehingga itu pengusaha kecil harus dikembangkan agar memberikan kontribusi terhadap ekonomi Indonesia. Hal ini hanya dapat dicapai jika pembinaan dan pengembangan pengusaha kecil diarahkan pada kemampuan melakukan ekspor. Untuk itu, pengusaha kecil harus memiliki kemampuan meningkatkan kualitas produknya serta melakukan proses manajemen yang efisien.

Alasan pentingnya pengembangan pengusaha kecil karena semua forum AFTA, NAFTA, Pasar Bersama Eropa, APEC dan sebagainya memasukkan produk pertanian sebagai pusat perhatiannya. Di Indonesia produk primer hasil pertanian maupun olahannya

sebagian besar dilakukan oleh petani pengusaha kecil, **sehingga** itu cukup beralasan jika Indonesia perlu memperhatikan pengembangan pengusaha kecil **tersebut** (Kompas, 14 September 1996).

Disisi lain, bahwa Indonesia akan sernakin berdaya saing jika struktur ekonomi tidak menanggung **beban** ekonomi yang tinggi. Kurangnya kesempatan kerja, tingkat pendidikan yang **rendah**, serta produktifitas yang **rendah** merupakan **beban** ekonomi yang mempengaruhi rendahnya efisiensi dan produktifitas Indonesia. Pengembangan pengusaha kecil merupakan salah satu cara untuk menurunkan **beban** ekonominya tersebut, sebab dengan meningkatnya pendapatan masyarakat kecil maka akan meningkatkan tingkat pendidikan mereka, akibatnya produktifitas dan efisiensi makro ekonomi akan dapat tercapai. Kesemuanya ini akan mendorong kemampuan daya saing Indonesia dalam perdagangan Indonesia.

## V. KESIMPULAN FAKTOR-FAKTOR SINTESIS

Perumusan kebijakan **pengembangan** dan pembinaan pengusaha kecil dan koperasi perlu mempertimbangan faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Arah kebijakan pembangunan ekonomi harus memperhatikan 2 variabel **utama** yang mempengaruhi perbaikan ekonomi masyarakat (terutama masyarakat  **miskin**) yaitu variabel "manfaat" dan variabel "beban ekonomi". Masyarakat harus mendapatkan **manfaat** dari setiap aktifitas ekonomi bagi perbaikan taraf hidupnya, serta mendapatkan **beban** ekonomi yang **rendah** dari pertumbuhan ekonomi yang dicapai.
- b. **Manfaat** pengembangan dan pembinaan pengusaha kecil dapat diperoleh **3 hal** sebagai berikut :

1. Dapat menekan jumlah masyarakat  **miskin** sebab pengusaha kecil dapat menyerap jumlah tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat sehingga mendorong **perbaikan** taraf **hidup** masyarakat  **banyak**.
2. Ekonomi Indonesia semakin efisien (orientasi ekonomi makro) sebab dengan semakin  **banyak**nya jumlah masyarakat yang  **berpartisipasi** dalam proses produksi (bisnis) maka arus masuk devisa akan semakin tinggi. Hal ini dapat terjadi jika pengusaha kecil **diarahkan** pada orientasi ekspor.
3. Struktur pelaku ekonomi semakin efisien dan produktif (orientasi ekonomi mikro) sebab jika struktur konglomerasi Indonesia disusun dengan memasukkan partisipasi pengusaha kecil dengan cara  **hasil** produksi pengusaha kecil dikonsumsi oleh pengusaha besar, kemudian diolah kembali oleh pengusaha besar agar bernilai tambah untuk pasar lokal atau ekspor, maka cara ini akan membuat pengusaha besar menjadi semakin efisien dan produktif sebab  **beban** ekonomi tenaga kerja dan bahan baku ditanggung oleh pengusaha kecil, sedangkan pengusaha kecil mendapatkan  **manfaat** jaminan pemasaran  **hasil produksinya**. Hal ini dapat terjadi jika pengusaha kecil mampu berorientasi kualitas, sedangkan pengusaha besar melakukan prinsip keadilan (fairness) dan keterbukaan (openness) terhadap kebijakan harga.
- c. **Peran** pemerintah harus  **berfungsi** sebagai "public services" artinya benar-benar secara terbuka

memfasilitasi akses pasar. informasi,  **teknologi**, sumber modal, serta sumber bahan baku. Untuk itu, kebijakan pemerintah harus bernilai  **operatif** yang  **langsung** menjawab kebutuhan para pelaku ekonomi secara seimbang, kemudian dalam implementasi  **fungsi** tersebut maka setiap instansi harus saling berintegrasi dengan satu visi, misi, dan sasaran yang  **sama**.

- d. Kemampuan daya saing Indonesia dalam perdagangan global dapat dicapai jika butir (a) sampai (c)  **tersebut** diatas dapat dicapai secara efektif

## BAHAN BACAAN

Kompas, 30 Agustus 1996. *Krisis Harga Cabai di Brrbes - Petani tak Butuh Janji, tapi Bukti*, hal. 17.

31 Agustus 1996. *Krisis Cabai Brebes : KUD Cari Pegangan, Petani Terpaksa Jual ke Pedagang*, hal. 17.

----- 14 September 1996. AFTA *Bersabar Hadapi Indonesia*, hal 2 1.

Mintzberg, Henry., 1979. *The Structuring of Organizations : A Synthesis of the Research*. Prentice-Hall, Inc., New Jersey, USA.

----- 1993. *Structure in Fives : Desoning Effective Organizations*. Prentice-Hall International, Inc.. New Jersey, USA.

Perrow, Charles., *Small Firm Network*. in Nitin Nohria and Robert G. Eccles, 1992. *Networks and Organizations : Structure, Form, and Action*. Harvard Business School Press, Boston, USA.

Sanim, Bunasor, 1997a. *Kebijakan Pengembangan dan Pembinaan Pengusaha Kecil di Indonesia : Wujud Keberpihakan Kepada Ekonomi Kerakyatan*. Institut Pertanian Bogor.

1997b. *Makalah Bahasan Pemberdayaan Masyarakat Jawa Barat*. Institut Pertanian Bogor.